



Karena Mulia Diukur Dengan Kekayaan



TAUFIQ RAHMAN, Ph.D.
(Pakar Sosiologi UIN Bandung)

Dalam kacamata pakar sosiologi, korupsi yang selalu terjadi disebabkan masyarakat yang sudah mengukur kemuliaan dari kekayaan. Ini bukan hanya terjadi di kalangan politisi, tetapi juga di ormas-ormas, khususnya organisasi kader dan organisasi kepemudaan. Mereka selalu terlalu mudah mengandalkan sumbangan dari politisi. Dalam dunia pendidikan pun demikian. Yang bagus itu diukur dengan kemewahan. Berikut lebih lengkapnya pemaparan pakar sosiologi yang pernah mengenyam pendidikan di Belanda, Malaysia, dan Pesantren Benda, Tasikmalaya ini.

Tanggapan anda tentang kasus korupsi KTP-el dengan nominal triliunan rupiah?

Pertanya, hal ini terus berulang karena ada ketidakjelasan harga. Parahnya, hal ini terjadi bahkan di semua lapangan. Seperti yang dialami oleh kawan saya yang biasa mengambil proyek pembangunan masjid di Malaysia. Ketika ia mengambil proyek di Indonesia, setoran nya itu 60% untuk biaya lain-lain. Padahal bukan untuk diambil, tapi karena ketidakjelasan harga itu tadi. Nah, begitu juga dalam kasus e-KTP ini. Karena ketidakjelasan harga ini, akhirnya anggaran yang dibuat selalu ada kurang, selalu tidak cukup. Akhirnya, minta lagi, minta lagi.

Kemudian hal ini diperparah oleh alasan yang *keftua*, yaitu kehilangan tujuan berpolitik. Karena kehabisan orang berpolitik itu untuk cari untung. Selanjutnya apa? Ya, misalnya ketika harga dan anggaran sudah pas. Akhirnya dia mengambil barang

yang lebih rendah kualitasnya, dari yang seharusnya. Nah, ketika itulah terjadi *mark-up*, pengelambungan harga. Terjadi korupsi. Makanya kalau dalam istilah Belanda itu ada kalimat, "*cheap is good, good is cheap*". Ya, di Indonesia ini seperti murah tetapi mahal. Seperti ya tadi, mengambil barang yang murah, tapi jadi mahal oleh biaya perawatannya. Gampang rusak. Begitu juga dengan gaji DPR, seperti murah (*kecil*) tetapi minta lagi, minta lagi. Mintanya pada siapa? Ya, para eksekutif, akhirnya mereka harus bagi-bagi. Maka terjadilah korupsi berjamaah.

Apakah korupsi memang tidak bisa dihilangkan dengan hukuman?

Sebetulnya, hukuman itu bagus. Harus selalu ada. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hukum itu bisa berjalan dengan semestinya. Bahwa memang UU yang sudah dibuat itu dijalankan dengan benar.

Mesti ada kesesuaian antara UU dengan kenyataan. Jangan ini malah menambah ruang untuk praktek korupsi lainnya. Seperti menyogok hakim, dan lain-lain.

Lembaga seperti KPK juga ini sebenarnya sudah cukup bagus. Masih lebih bagus daripada di zaman Soeharto dulu, Pengawasan Melekat (Waskat) itu tidak jelas. Namun ya itu tadi, KPK harus lebih massif dan tidak tebang pilih. Karena hukum itu jangan berpolitik. Cukup eksekutif, legislatif dan yudikatif saja yang berpolitik. Hukum itu harus lurus. Kalau tidak demikian, orang akhirnya akan melecehkan.

Bukankah para pejabat negara itu sudah mendapatkan gaji yang cukup dan sudah tahu hukuman untuk praktik pidana korupsi. Mengapa kemudian banyak dari mereka yang tergiur untuk melakukan praktik korupsi?

Hal ini juga akhirnya menjadi kompleks. Kesalahannya bermula juga dari cara pandang masyarakatnya. Bahwa orang yang mulia itu adalah mereka yang kaya. Sehingga akhirnya mereka berpolitik pun, untuk mencari kemuliaan. Mereka korupsi itu untuk mencari kemuliaan. Nah, karena yang mulia itu adalah yang kaya. Ya, akhirnya ia terus mencari cara untuk memperkaya diri, kelompok dan partainya.

Kemudian juga mereka telah kehilangan prinsip kebersamaan. Mereka kehilangan kesadaran untuk mengabdikan. Keadilan sosial tidak diperjuangkan. Mereka kehilangan kesederhanaan. Mereka tidak menerapkan prinsip *husnul-khatimah*. Akhirnya, masa jabatannya itu digunakan untuk berlomba. Berlomba untuk apa? Mencari untung sebesar-besarnya. Apalagi ongkos demokrasi ini kan mahal. Rakyat ini kan perlu dirayu, minimal lima tahun sekali. Ketika uang mereka tidak cukup, akhirnya ya mereka berkorupsi.

Jadi memang ada yang salah dengan sistem politiknya itu sendiri? Bagaimana solusinya?

Ya itu tadi, ongkos demokrasi ini memang mahal. Jadi ya, mereka yang tidak kuat secara pribadi, akhirnya mencari dana dari yang lainnya.

Apakah ini juga menjadi gambaran bahwa budaya korupsi di tengah-tengah masyarakat Indonesia sudah sangat akut?

Karena memang masalah korupsi ini sudah berurat-akar di Indonesia. Bahkan ormas pun sekarang sudah terlibat. Ormas, organisasi kader, organisasi kepemudaan. Mereka mengajukan proposal kepada para pejabat. Membuat kegiatan di Hotel. Itu semua kan sebetulnya *high-cost*. Kalau kita bicara orpol sudah jelas lah memang. Tapi kalau ormas kan seharusnya berorientasi keummatan. Tapi yang terjadi sekarang, mereka malah berebut sumbangan. Padahal seharusnya mereka itu jangan mau terlibat dengan hal-hal seperti itu. Jangan mengandalkan pemerintah apalagi sampai menjilat.

Ya, cobalah berlatih sederhana. Kalau ada kegiatan itu kembali ke Masjid. Masjidnya pun tidak perlu terlalu megah. Karena kalau masjid sudah terlalu megah. Masjid bisa kehilangan humanitasnya. Contoh sederhana saja, sekarang kita tidak boleh tiduran di Masjid. Nah, jadi masjid ini untuk siapa? Untuk manusia bukan?

Mungkinkah itu semua berawal dari kegagalan pendidikan di negeri ini? Jika iya, bagaimana memperbaikinya?

Saya yakin sekolah dan pesantren itu tidak pernah mengajarkan kecurangan. Tetapi praktek di masyarakatnya lah yang kadang rusak. Menyambung pertanyaan sebelumnya juga. Justru di masyarakat lah kadang mereka belajar kecurangan. Misalnya, sopir angkot

yang me
lain sehi

Kan
yang su
mereka
sendiri.
sebenan

Mer
penting
Sehing
Kegiatan
misal
melatit
memu
tidak d
mengh
kenikn

Ap
soluti
buday
masy:

Ke
Islam
Islam
dari l
Mung

Abdu
orang
perad
Roma
takut
menj

keses
duni
Ajari
Etos
jawa
prin

prin
meg
Al-I
Bag
khu